



H. JEJE WIRADINATA
BUPATI PANGANDARAN

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018



H. ADANG HADARI
WAKIL BUPATI PANGANDARAN

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pasal 1 ayat (8), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografi Daerah

Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, yang jaraknya dari ibukota Provinsi ± 236 Km. Secara geografis wilayah Kabupaten Pangandaran berada pada $108^{\circ}30'$ sampai dengan $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ sampai $7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Dilihat di peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Kabupaten Pangandaran mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya.
- ❖ Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya.

Topografi Kabupaten Pangandaran terdiri dari, dataran rendah, perbukitan dan dataran tinggi, daerah dataran tinggi perbukitan dengan topografi bergelombang terletak di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Cigugur, daerah dataran rendah dan perbukitan terletak di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Mangunjaya, daerah perbukitan dan dataran rendah berpantai terletak di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak.

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 adalah 415.563 jiwa terdiri dari 208.962 laki-laki dan 208.601

Perempuan. Berikut adalah gambaran luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.

**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Parigi	98,04	44.169	450,52
2.	Cijulang	93,16	18.058	301,18
3.	Cimerak	118,18	48.229	408,1
4.	Cigugur	97,29	22.310	229,31
5.	Langkaplancar	177,19	50.302	283,89
6.	Mangunjaya	63.03	32.461	515,01
7.	Padaherang	89.27	68.851	771,27
8.	Kalipucang	136,78	38.333	280,25
9.	Pangandaran	60,77	50.060	922,49
10.	Sidamulih	77,98	28.790	369,20
Total		1011,69	1011,04	417.563

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran Tahun 2018

3. Inovasi Daerah

Kabupaten Pangandaran merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang merupakan salah satu tujuan destinasi Wisata Indonesia, maka dengan adanya hal ini diperlukan Pembangunan Kepariwisataaan. Pembangunan kepariwisataan adalah pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempertahankan budaya, yang melibatkan seluruh *stakeholders*-nya dalam suatu sinergi. Dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran sebagai suatu destinasi wisata unggulan, dalam proses pelaksanaannya diperlukan suatu inovasi daerah sebagai wujud tanggung jawab dan keseriusan Pemerintah dalam upaya Peningkatan PAD dari sektor pariwisata.

Dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan pada era otonomi daerah memberikan harapan besae terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Agar Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran dituntut untuk lebih professional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek melalui kebijakan – kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kaerifan lokal yang dimiliki Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran membuat inovasi – inovasi yang berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah, meningkatkan pelayanan publik serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Berikut daftar program inovasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2018 :

**DAFTAR DATA INOVASI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018**

NO	NAMA INOVASI DAERAH	KATEGORI INOVASI	TAHUN PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Proyeksi Perubahan Diklatpim Kabupaten Pangandaran	Tata Kelola Pemerintah	2018	BKPSDM
2	Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Ringan Tapi Berdampak	Pelayanan Publik	2018	DPMPTSKUMKMP
3	pelayanan prima dan terukur dengan komitmen 0 (nol) rupiah di sub bagian umum dan kepegawaian dinas	Pelayanan Publik	2018	DISDIK
4	OSCAR (ODHA SUPORT CARE) UPTD PUSKESMAS Parigi 2018	Pelayanan Publik	2017	Dinas Kesehatan/ UPTD Puskesmas Parigi
5	Wisata Edukasi Bencana Goes To School (WEB GTS)	Pelayanan Publik	2017	DPKPBD
6	Bunda Belajar Mitigasi (BBM)	Pelayanan Publik	2017	DPKPBD
7	Sistem Inslislite Perpustakaan Pangandaran, Datang, Pinjam, Baca dan Antar Buku (" SI PUSPADAMBANKU")	Pelayanan Publik	2018	DISPUSIP
8	(PASAR OK) " Parkir Sehat Bebas Asap Rokok" Puskesmas Cikembulan	Pelayanan Publik	2017	Dinas Kesehatan/ UPTD Puskesmas Cikembulan
9	"JEMPLING" (Jemput Pelayanan Keliling)	Pelayanan Publik	2018	DISDUKCAPIL
10	"LANDAK" (Lahir Anak Dapat Akta Kelahiran)	Pelayanan Publik	2018	DISDUKCAPIL
11	Selalu Nyaman Untuk Mengurus Perizinan Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Mikro Kecil (SENYUMAN M'BA ISMIK)	Pelayanan Publik	2018	Kecamatan Langkaplancar
12	Sistem Kenaikan Pangkat Less Paper (SI-KEPAL)	Tata Kelola Pemerintah	2018	BKPSDM
13	Pembentukan Kampung Kb Simbar Jaya Rw 05 Dusun Sidomulyo Kecamatan/Kabupaten Pangandaran	Pelayanan Publik	2017	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Mobile Laboratory	Pelayanan Publik	2017	Dinas Kesehatan/UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Pangandaran

15	Lumbung Gizi Desa (BUGIZA) Lokasi Desa Cibogo UPTD Puskesmas Padaherang	Pelayanan Publik	2017	Dinas Kesehatan/UPTD Puskesmas Padaherang
16	Senin Minum Herbal (SEMIBAL) UPTD Puskesmas Padaherang	Pelayanan Publik	2017	Dinas Kesehatan/UPTD Puskesmas Padaherang
17	Sistem Informasi Manajemen Realisasi Anggaran Daerah (SIMRAD)	Tata Kelola Pemerintah	-	Setda_Bagian Pengendalian Pembangunan
18	PENINGKATAN PROMOSI DESTINASI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN BERBASIS WEBSITE	Pelayanan Publik	2017	Setda_Bagian Perekonomian/a.n ROHDI
19	Goverment Public Relations (GPR)	Pelayanan Publik		Diskominfo
20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Melalui Manajemen Administrasi Berbasis Online (SI_MARLIN) di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran	Tata Kelola Pemerintah	2018	Drs. DEDIH RAKHMAT, M.Si / Setda Bagian Umum
21	" SIRENBANGDETAS " (SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PERBATASAN)	Pelayanan Publik	2018	Suyatman, S.Sos.,M.Si/BAPPE DA

4. Kondisi Ekonomi

Potensi unggulan Kabupaten Pangandaran merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan mempunyai daya saing, baik karena ciri-cirinya yang khas maupun kualitasnya. Disamping itu juga, potensi unggulan tersebut berasal dari pemanfaatan potensi yang berasal dari sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang potensial untuk ditumbuhkembangkan. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih sektor Pariwisata di Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu tujuan utama destinasi wisata di Indonesia, hal ini termaktub dalam PP No. 50 Tahun 2011 RIPPARNAS 2010 - 2025 yang menetapkan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pembangunan kepariwisataan memerlukan landasan yang kokoh antara lain kebijakan strategis untuk dapat menciptakan partisipasi aktif seluruh lapisan guna memanfaatkan aktivitas pembangunan kepariwisataan secara luas untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pangandaran yang baru lepas dari predikat sebagai DOB seyogianya dapat membuat program kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Aspek kependudukan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Penduduk

memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan. Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan, maka data kependudukan sangat diperlukan mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, dan komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Kondisi kependudukan ini akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga apabila diiringi dengan kualitas SDM yang baik.

Adapun sebagai representasi ringkasan ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam pencapaian Indikator Makro pembangunan daerah, yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB sebagaimana tabel dibawah berikut ini:

**Perkembangan Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2015–2018**

NO	JENIS INDIKATOR	Nilai Capaian Per Tahun			
		2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah Peduduk (orang)	402.413	405.683	409.016	417.563
	Jumlah Penduduk Laki-Laki (orang)	202.095	203.269	205.032	208.962
	Jumlah Penduduk Perempuan (orang)	200.318	202.414	203.984	208.601
2	Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)	395	401	404	413
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,17	0,80	0,81	2,09
4	Laju Inflasi (%)	3,29	3,45	3,56	3,24
5	Penduduk Miskin:				
	Jumlah (jiwa)	41.970	40.140	39.460	32.190
	Persentase (%)	10,76	10,23	10,00	8,12
6	Indikator Ketenagakerjaan				
	Angkatan Kerja (Orang)	202.105	223.403	243.702	240.175
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,81	4,20	3,34	3,58
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,19	95,80	96,66	96,42
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,62	65,79	66,60	66,95
	Indeks Pendidikan	56,84	56,96	57,98	58,65

NO	JENIS INDIKATOR	Nilai Capaian Per Tahun			
		2015	2016	2017	2018*
	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,99	12.02	12,03	12,17
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.06	7.07	7,37	7,46
	Indeks Kesehatan	77,29	77,54	77,78	77,91
	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,24	70,40	70,56	70,67
	Indeks Pengeluaran	64,31	64,49	65,48	65,67
	Daya Beli Masyarakat (Rp.)	8.265.000	8.312.000	8.588.000	8.640.000
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	4.10	4,17	4,20
9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)	8.169.503,98	8.786.469,86	9.400.880,10	9.847.011,80
10	PDRB Atas Dasar Konstan (Juta Rp.)	6.271.087,22	6.528.068,32	6.939.636.80	7.087.463,40
11	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (Rp.)	20.921.535,57	22.367.845,22	23.654.828,61	24.791.878,33
12	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (Rp.)	16.059.821,36	16.618.599,29	17.211.405,70	17.644.147,48
13	Dependency Ratio (Angka Ketergantungan)	47,52	47,25	47,04	46,93
14	Sex Ration	99,12	99,57	99,48	99,82
15	Gini Ratio	0,35	0,33	0,35	0,34

Sumber : - BPS Kabupaten Ciamis , 2018 . *) angka sementara
- Data Kependudukan Didukcapil Kabupaten Pangandaran, 2018,

III. VISI DAN MISI

1. Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran adalah :

“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI
TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa

yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
	2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
	3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
	4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal
	5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
	6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

IV. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelompokan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai keseluruhan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan anggaran yaitu sebesar Rp. 1.206.030.282.733,43 (Satu Trilyun Dua Ratus Enam Milyar Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Empat Puluh Tiga Rupiah) dari total anggaran tersebut dapat terealisasi yaitu sebesar Rp. 1.161.646.578.170,45 (Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Koma Empat Puluh Lima Rupiah) atau 96,32%. Dari jumlah anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar Rp. 628.966.366.315,43 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Belas Koma Empat Puluh Tiga Rupiah) sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 577.063.916.418,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah). Adapun realisasi untuk masing-masing jenis belanja adalah, Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 617.984.847.570,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sekitar 98,25%, sedangkan untuk Belanja Langsung

teralisasi sebesar Rp. 543.661.730.600,45 (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Koma Empat Puluh Lima Rupiah) atau 94,21%, dengan jumlah program keseluruhan sebanyak 284 program dan 1.644 kegiatan, yang terbagi ke dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Berikut tabel anggaran dan realisasi dimasing – masing SKPD T.A 2018 dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan wajib.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
di Masing-Masing SKPD Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN FUNGSI DAN BIDANG PEMERINTAHAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15	120	94.842.028.408,00	93.137.557.552,00	98,20
2	Dinas Kesehatan	20	117	152.747.820.739,00	136.008.947.936,45	89,04
3	Dinas Pekerejaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16	151	199.470.472.605,00	190.243.717.895,00	95,37
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah	6	39	2.170.871.000,00	2.454.576.975,00	113,07
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	53	10.379.171.300,00	10.110.883.162,00	97,42
6	Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi	11	48	1.916.742.500,00	1.753.277.525,00	91,47
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8	42	6.915.722.000,00	6.435.270.284,00	93,05
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	31	2.726.658.080,00	2.629.874.210,00	96,45
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	50	4.532.099.142,00	4.022.636.788,00	88,76
10	Dinas Perhubungan	4	38	8.303.057.000,00	8.226.843.408,00	99,08
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9	39	1.607.353.000,00	1.560.379.417,00	97,08
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan	16	54	7.540.298.717,00	7.355.541.161,00	97,55
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	39	2.747.284.400,00	2.618.589.454,00	95,32
14	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	9	47	4.311.579.900,00	4.174.256.480,00	96,82
15	Dinas Pariwisata dan	13	64	7.068.405.100,	6.717.618.017,0	95,04

NO	URAIAN FUNGSI DAN BIDANG PEMERINTAHAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
	Kebudayaan			00	0	
16	Dinas Pertanian	10	47	9.155.576.838,00	8.534.529.957,00	93,22
17	Sekretariat DPRD	7	45	11.903.353.698,00	11.594.994.449,00	97,41
18	Inspektorat	6	30	1.506.690.500,00	1.483.575.875,00	98,47
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	59	5.705.702.125,00	5.311.741.778,00	93,10
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	77	11.293.417.800,00	10.300.451.928,00	91,21
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7	43	2.776.949.066,00	2.568.100.259,00	92,48
22	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	8	33	5.557.208.000,00	5.441.977.490,00	97,93
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7	34	1.009.400.000,00	945.081.188,00	93,63
24	Sekretariat Daerah	19	95	18.081.124.500,00	17.437.912.192,00	96,44
25	Kecamatan Cijulang	4	25	268.899.000,00	263.753.068,00	98,09
26	Kecamatan Cimerak	5	26	288.287.000,00	260.413.696,00	90,33
27	Kecamatan Parigi	4	24	280.468.000,00	239.747.986,00	85,48
28	Kecamatan Cigugur	5	25	279.542.000,00	275.944.039,00	98,71
29	Kecamatan Langkaplancar	5	26	276.289.000,00	253.898.036,00	91,90
30	Kecamatan Mangunjaya	4	25	267.306.000,00	251.641.875,00	94,14
31	Kecamatan Padaherang	4	24	292.388.000,00	277.371.454,00	94,86
32	Kecamatan Kalipucang	4	24	265.029.000,00	260.748.839,00	98,39
33	Kecamatan Pangandaran	4	27	290.312.000,00	251.113.232,00	86,50
34	Kecamatan Sidamulih	6	23	286.410.000,00	258.762.995,00	90,35
JUMLAH		284	1.644	577.063.916.418,00	543.661.730.600,45	94,21

Simda Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : PANGANDARAN

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERA NGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Wajib							
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak	11,556	65.81 %	
				Jumlah anak usia 4-6 Tahun	17,560		
		2	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf	324,998	98.32 %	
				Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	330,567		
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A	39,246	104.10 %	
				Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	37,701		
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	19,026	100.10 %	
				Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	19,007		
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI	0	0 %	
				Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI	39,246		
		6	Angka Putus Sekolah (APS)	Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs	0	0 %	

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERA NGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			SMP/MTs	Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs	19,026		
1	Pendidikan	7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	6,664	100 %	
				Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI	6,664		
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	6,211	100 %	
				Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs	6,211		
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	6,545	98.21 %	
				Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	6,664		
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	4,319	94.45 %	
				Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	4,573		
2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan	1,428	100 %	
				Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan	1,428		
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	Jumlah ibu bersalin	6,056	99.23 %	
				Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	6,103		

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERA NGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kebidanan				
		13	Cakupan Desa/keluraha n Universal Child Immunizat ion (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	82	88.17 %	
				Jumlah seluruh Desa / Kelurahan	93		
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk	54	100 %	
				Jumlah seluruh balita gizi buruk	54		
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+)	372	100 %	
				Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	372		
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	137	100 %	
				Jumlah penderita DBD	137		
		17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1	77,470	57.97 %	
				Jumlah seluruh Maskin di Kab/Kota	133,630		
		18	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi	6,535	106.92 %	
				Jumlah seluruh bayi lahir hidup	6,112		
3	Lingkungan	19	Penanganan	Volume sampah yang	30,224	18.10 %	

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERA NGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Hidup		sampah	ditangani (m3)			
				Volume produksi sampah (m3)	167,025.2		
		20	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional tergolong baik	3	100 %	
				Jumlah seluruh seluruh pasar	3		
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m3)	15,550	37.24	
				Jumlah penduduk	417,563		
		22	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	5	100 %	
				Jumlah kasus lingkungan yang ada	5		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Panjang jalan kota dalam kondisi Mantap	302.58	60.00 %	
				Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut	504.31		
		24	Luas Irigasi dalam kondisi baik	Luas irigasi dalam kondisi baik	16.445	89.23 %	
				Luas irigasi	18.429		
		25	Rumah Tangga Ber-sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi	83,090	55.98 %	
				Jumlah total rumah tangga	148,431		
		26	Kawasan	Luas kawasan kumuh	36.14	0.04 %	

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERA NGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kumuh	luas wilayah	101,100		
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau	76,307.58	75.48 %	
				Luas wilayah ber HPL/HGB	101,100		
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	105,745	71.24 %	
				Jumlah rumah tangga	148,431		
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan pemukiman kumuh	36.14	0.04 %	
				luas wilayah	101,100		
		30	Rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah	146,045	72.61 %	
				Jumlah rumah layak huni	106,038		
8	Kepemudaan dan Olah Raga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kota	107	0.26 per 1000 penduduk	
				Jumlah penduduk	417,563		
		32	Lapangan olahraga	Jumlah lapangan olahraga	402	0.96 per 1000 penduduk	
				Jumlah penduduk	417,563		
9	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN 2018	194,497,914,467	-64.19 %	
				Realisasi PMDN 2017	543,189,364,000		
10	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif	68	88.31 %	
				Jumlah seluruh koperasi	77		

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		35	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil	10,371	95.30 %	
				Jumlah seluruh UKM	10,882		
11	Kependudukan & Catatan Sipil	36	kepemilikan KTP	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	285,596	89.44 %	
				Jumlah penduduk yang wajib KTP	319,314		
		37	kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	184,185	0.44 per 1000 penduduk	
				Jumlah penduduk	417,563		
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	
12	Ketenagakerjaan	39	Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja /buruh peserta program jamsostek aktif	551	100 %	
				Jumlah pekerja/buruh	551		
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	2,763	84.62 %	
				Jumlah pencari kerja yang mendaftar	3,265		
13	Ketahanan Pangan	41	Regulasi ketahanan pangan	Peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb	Ada	Ada	
		42	Ketersediaan pangan utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)	273,386, 980	654,720. 32 per 1000 penduduk	
				Jumlah penduduk	417,563		

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	6,224	11.95 %	
				Jumlah pekerja perempuan	52,080		
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	Jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf	131,464	97.70 %	
				Jumlah anak perempuan usia>15	134,556		
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	52,957	39.36 %	
				Jumlah angkatan kerja perempuan	134,556		
15	Pengendalian dan Keluarga Berencana	46	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif	62,774	75.15 %	
				Jumlah pasangan usia subur	83,535		
		47	Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan	jumlah desa / kelurahan	93	1.60 %	
				Jumlah PLKB/PKB	58		
16	Perhubungan	48	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat	105	64.52 %	
				Jumlah penumpang angkutan darat	162.749		
17	Komunikasi & Informatika	49	Web site milik pemerintah daerah	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	
		50	Pameran/expo	Jumlah pameran/expo per tahun	7	7	

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERA NGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Pertanahan	51	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah	647,513	19.16 %	
				Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	3,380,250		
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan	4	100 %	
				Jumlah kasus yang terdaftar	4		
		53	Penyelesaian Ijin Lokasi	Jumlah ijin lokasi	10	100 %	
				Permohonan ijin lokasi	10		
		54	PKK aktif	Jumlah PKK aktif	104	100 %	
				Jumlah PKK	104		
22	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	55	Posyandu	Jumlah Posyandu aktif	526	100 %	
				Total Posyandu	526		
		56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Jumlah sarana sosial	22	22	
				Jumlah sarana sosial	22		
23	Sosial	57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental,serta lanjut usia yg tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	370	23.07 %	
				Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu	1,604		
		58	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental,serta lanjut usia yg tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun	370	23.07 %	
				Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu	1,604		

N O	URUSAN	N O	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tahun			
		58	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	48,272	84.55 %	
				Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	57,096		
Urusan Pemerintahan Umum/Trantibumlinmas							
	Trantibum dan Linmas	1	Kegiatan pembinaan politik daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	9	9 Kegiatan	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	12	12 Kegiatan	

V. HASIL OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
1	Opini BPK terhadap LKPD	Status Laporan	WTP	WTP	100%
2	Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	
3	Tingkat kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	
4	Nilai AKIP	Nilai	Cc	Cc	
5	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	88	88	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki 5 indikator kinerja sasaran dengan rincian : indikator sasaran mencapai target dan indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 untuk

indikator sasaran Opini BPK terhadap LKPD sebesar 100% dikategorikan baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK Terhadap			
Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%

Penilaian tahun 2017

Berdasarkan capaian dari Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran untuk mendukung Penilaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran tersebut diterapkan satu indikator sebagai berikut :

Dari pencapaian IKU yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, mendapatkan Nilai WTP dengan kriteria :

- 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
 - 2. Kecukupan pengungkapan dalam penyajian Laporan Keuangan
 - 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - 4. Efektifitas sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset
 - 5. Penyampaian Laporan Keuangan yang tepat waktu.
1. Opini BPK terhadap LKPD mencapai target dikarenakan :
- a. Langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan WTP ini adalah dengan membuat terobosan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu dengan membangun sistem elektorik diantaranya adalah SIMDA online artinya pengelola simda di Seluruh Perangkat daerah dapat mengakses SIMDA dari manapun mereka berada asal tersedia koneksi internet, selain itu dengan dilaksanakannya sistem SP2D online, serta dengan mengintegrasikan seluruh Sistem pengelolaan keuangan (SIMDA Pengelolaan Keuangan, SP2D online) dan Aset daerah, Dengan integrasi ini diharapkan semua system informasi yang ada akan memungkinkan data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan validitas yang baik, sehingga memudahkan dalam penyampaian laporan keuangan.
 - b. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;

- c. Pelaporan keuangan telah berbasis Akruwal (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;
- d. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern;
- e. Ditetapkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2015 yang merupakan dokumen Kebijakan Akuntansi yang wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana Termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
- f. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah disusun berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali Laporan Keuangan. Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.
- g. Ditetapkannya Kebijakan Pendapatan Daerah, diantaranya :
 - 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan
 - 2. Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi telah disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat dan Provinsi
 - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
- h. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, mendapatkan Nilai WTP dengan indikator capaiannya baik yaitu "Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten", dan "Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersertifikat"
".Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset yang di aplikasikan pada sistem aplikasi SIMDA BMD.
- i. Adanya manajemen aset meliputi : penertiban, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah mendorong percepatan penguatan

APBD termasuk perencanaan penerimaan dan pendapatan daerah (PAD). Penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendorong pencapaian pemberian opini/pendapat pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi :

- 1) pengamanan fisik,
- 2) pengamanan administratif dan
- 3) pengamanan hukum.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah dua (2) tahun berturut-turut mendapatkan penilaian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI yaitu pada Tahun 2016 dan 2017.

Dari 28 lembaga pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, 25 di antaranya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk LKPD Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah tujuh kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meraih Opini WTP yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar. Sementara tiga kabupaten/kota yang masih meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan kabupaten/kota tersebut agar bisa membuat laporan keuangannya dengan baik. WTP memang bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam LKPD. Namun, WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar.

VI. TUGAS PEMBANTUAN

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 adalah ; Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud RI) dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

A. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

- a) Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar (SD)
 - a. Pembangunan Ruang Perpustakaan SD

- b. Rehabilitasi Ruang Belajar SD
- b) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B dan Paket C
 - a. Pelaksanaan BOP Paket B
 - b. Pelaksanaan BOP Paket C
 - c. Pelaksanaan BOP Paket C Tahap 2
- c) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha.
 - a. Pelaksanaan BOP Pendidikan Kecakapan Kerja
 - b. Pelaksanaan BOP Pendidikan Wirausaha

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 adalah ; Kementerian Pertanian melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

A. Program dan kegiatan yang dilaksanakan

- a) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
 - a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
 - b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serella

B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (TP Provinsi)

- a) Bantuan Budidaya Padi Inhibrida (kontrak Provinsi)
- b) Bantuan Benih Padi dan Jagung Kegiatan Tumpangsari (kontrak Pusat)
- c) Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi
- d) Pengembangan Jagung Hibrida

C. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

- a) Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian melalui Rehabilitasi Irigasi
- b) Pengembangan Sumber Air (Base Line)
- c) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
- d) Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Subsektor Hortikultura pengadaan Cultivator.

D. Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian

- a) Peningkatan Produksi Cabe Merah
- b) Pengadaan Bantuan Hand Sprayer
- c) Bantuan Pompa Air
- d) Bantuan Cultivator

VII. Penutup

Pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu bentuk integritas dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar *stakeholder* terkait guna mewujudkan *good local governance* dan secara yuridis formil didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan kerangka pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2018 wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat dalam kerangka mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2018 dan pada gilirannya akan memberikan *feedback* secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun-tahun berikutnya.

Parigi, 29 Maret 2019

BUPATI PANGANDARAN

ttd.

H. JEJE WIRADINATA